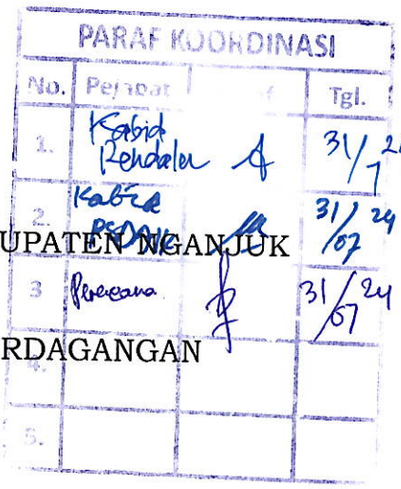


LAMPIRAN XXII
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam periode 1 (satu) tahun.

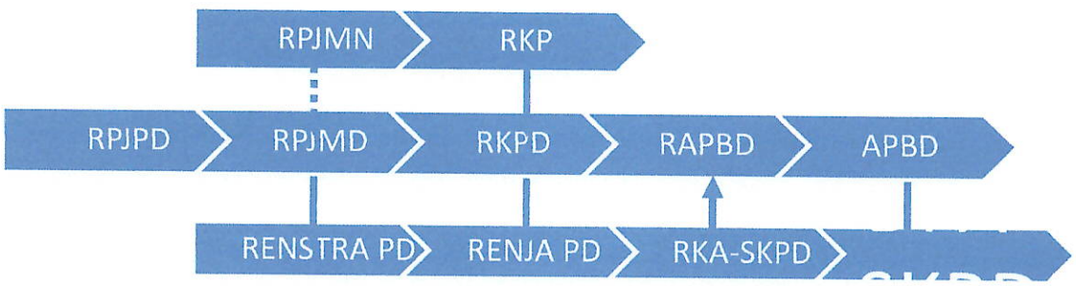
Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;

c. penyusunan rancangan
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk mempunyai kedudukan strategis dalam kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi satu kesatuan dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Gambar 1.
Diagram Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Keterangan:
diperhatikan
dipedomani dan/atau diacu
dipedomani dan/atau diacu

Sumber :Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan pada akhirnya Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan digunakan sebagai dasar penyusunan

Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
27. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;

28. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
29. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.
30. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Keluarahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor1);
43. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
44. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
45. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
46. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025

dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program, kegiatan maupun perencanaan kebutuhan anggaran/pagu indikatif pada Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

Tujuan Penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah:

a. Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator dan target, serta pagu indikatif tahun 2025 yang tertuang dalam arahan kebijakan berdasarkan hasil analisis dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023;
b. Merumuskan suatu dokumen perencanaan sebagai penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 pada tahun ke-3 (ke-tiga) periode tahun 2025; dan
c. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN LALU
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD; dan
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional;
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk; dan
3.3 Program dan Kegiatan.
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian RenstraPerangkat Daerah

Pelaksanaan evaluasi Renja Perangkat Daerah sebagai salah satu fungsi untuk mengetahui capaian kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah melalui capain kinerja program/kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 beserta perubahannya, dan RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 beserta perubahannya, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang kemungkinan berdampak pada target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab dimaksud.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2023 yang mengacu pada APBD Tahun Anggaran 2023, serta pencapaian Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana tabel berikut

TABEL 2. 1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023 KABUPATEN NGANJUK
(TARGET BERDASARKAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2018 - 2023)

KODE REKENING	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2025	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN DANKKEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DANKEGIATAN TAHUN LALU (2023)						TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2024		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN		
					TARGET RENJA PD TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2023)		TINGKAT REALISASI TAHUN2023				REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11
	URUSAN PERDAGANGAN														
3.30.02	**Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan**	Persentase Fasilitasi Ijin Usaha Perdagangan	90%	36.67	90	%	36.67	%	41	%	90	%	90	%	100
3.30.02.2.06	**Penerbitan Tanda Daftar Gudang**	Jumlah Rekomendasi Teknis Penerbitan Tanda Daftar Gudang			90	%	22		24	%	90	%	90	%	100
3.30.02.2.06.03	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	100 Dokumen	22 Dokumen	60	Dokumen	22	Dokumen	37	%	26	Dokumen	26	Dokumen	100
3.30.03	**Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**	Persentase Peningkatan Pembangunandan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	21%	40	21	%	42.42	%	202	%	1.026	Milyar	1,026	Milyar	100
3.30.03.2.01	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	11 Unit	14 Unit	6	Unit	14	unit	233	%	7	Unit	7	Unit	100
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	7 Unit	14 Unit	9	Unit	14	Unit	156	%	3	Unit	3	Unit	100
3.30.03.2.02	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	Jumlah pembinaan terhadap pengelolaan sarana distribusi perdagangan	33 Pasar dan 11 Pasar Pendukung	1 Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	%	1	Dokumen	1	Dokumen	100
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	%	1	Dokumen	1	Dokumen	100
3.30.04	**Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**	Persentase Pengawasan Harga Pokok	5.71%	5.96	5.71	%	9.85	%	173	%	5.71	%	5.71	%	100
3.30.04.2.02	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten / Kota**	Jumlah informasi harga yang dilaksanakan	12 Bulan	4 Laporan	4	Laporan	12	Laporan	300	%	4	Laporan	4	Laporan	100
3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (satu) Kabupaten / Kota	Jumlah laporan pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Pasar Kabupaten/Kota	4 Laporan	4 Laporan	4	Laporan	12	Laporan	300	%	4	Laporan	4	Laporan	100
	Pengawasan pupuk dan pestisida Bersubsidi di tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Pengawasan pupuk dan pestisida Bersubsidi di tingkat daerah kabupaten/kota	12 Laporan	96.44	90	%	96.00	%	107	%	5.71	%	5.71	%	100
	Pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi dengan realisasi minimal 90%	12 Laporan	12 Laporan	12	Laporan	4	Laporan	33	%	4	Laporan	4	Laporan	100
3.30.06	**Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen**	Persentase alat ukur, takar,timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku	86.11%	199	86.11	%	55.28	%	64	%	86.11	%	86.11	%	100
3.30.06.2.01	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	Jumlah pelaksanaan metrology legal berupa tera,tera ulang dan pengawasan	18000 Unit	50.18	18,000	Unit	9,950		55	%	8.500	UTTP	8,500	UTTP	100
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat ukur, alat takar,alat timbang dan alat perlengkapan ditera/tera ulang	18000 Unit	9950 Unit	5,000	Unit	9,950	UTTP	199	%	8.500	Unit	8.500	Unit	100
	Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pelaku usaha di bidang metrologi legal yang di bina	200 Orang	736 orang	100	Masyarakat	1,296	orang	1,296	%	120	Orang	120	Orang	100

KODE REKENING	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2025	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN DANKKEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DANKEGIATAN TAHUN LALU (2023)						TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2024		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN		
					TARGET RENJA PD TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2023)		TINGKAT REALISASI TAHUN2023				REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
3.30.07	**Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**	Persentase fasilitasi promosi dan pemasaran produk	61.04%	194	61.04	%	**193.62**	**%**	**317**	**%**	61.04	%	61.04	%	**100**
3.30.07.2.01	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	Jumlah UMKM pelaksanaan promosi,pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	47 UMKM	91 UMKM	47	UMKM	91	UMKM	**194**	**%**	40	UMKM	40	UMKM	**100**
3.30.07.2.01.02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri melaluikemitraan dengan retail, marketplace,perhotelan dan Jasa	47 UMKM	57	47	UMKM	91	UMKM	**194**	**%**	40	UMKM	40	UMKM	**100**
3.31.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**	Survei Kepuasan Masyarakat	86%	85,20	80	%	**80.13**	%	**100**	**%**	85,20	%	85,20	%	**100**
3.31.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Dokumen perencanaan, penganggarandan evaluasi kinerja perangkat daerah	17 Dokumen	17 Dokumen	**17**	dokumen	17	Dokumen	**100**	**%**	**17**	dokumen	**17**	dokumen	**100**
3.31.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 Dokumen	9 Dokumen	9	Dokumen	9	Dokumen	**100**	**%**	4	Dokumen	4	Dokumen	**100**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasiKinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar	4 Dokumen	4 Laporan	4	Laporan	4	Laporan	**100**	**%**	4	Laporan	4	Laporan	**100**
	Evaluasi Kinerja Perangakt Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 Dokumen	4 Laporan	4	Laporan	4	Laporan	**100**	**%**	5	Laporan	5	Laporan	**100**
3.31.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	104 Dokumen	**Dokumen**	18	Dokumen			**0**	**%**	104	Dokumen	104	Dokumen	**100**
3.31.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orangyang menerima gaji dan tunjangan ASN	75 Orang	67 Orang	90	Orang	68	ASN	**76**	**%**	71	Orang	71	Orang	**100**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahunSKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	1	2	Laporan	1	Laporan	**50**	**%**	1	Laporan	1	Laporan	**100**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	25 Laporan	2	2	Laporan	1	laporan	**50**	**%**	36	Laporan	36	Laporan	**100**
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian /Verifikasi keuangan SKPD	60 Dokumen	87 Dokumen	50	Dokumen	87	dokumen	**174**	**%**	50	Dokumen	50	Dokumen	**100**
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 Dokumen	67 Dokumen	85	Dokumen			0	**%**	1	Dokumen	1	Dokumen	**100**
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	85 Paket		80	Paket	67	paket	**84**	**%**	-		-		-
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orangyang mengikuti sosialisasi peraturan perundang - undangan	85 Orang		100	Orang	100	orang	**100**	**%**	-		-		-

KODE REKENING	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2025	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN DANKKEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DANKEGIATAN TAHUN LALU (2023)						TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2024		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN		
					TARGET RENJA PD TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2023)		TINGKAT REALISASI TAHUN2023				REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
3.31.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah	**4 Dokumen**	80	1	Dokumen	1	Dokumen	**100**	%	4	Dokumen	4	Dokumen	100
3.31.01.2.06.01	Penyediaan komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor yang disediakan	50 Paket Komponen	11 Paket	11	Paket	14	Paket	**127**	%	50	Paket	50	Paket	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	12 Paket	14 Paket	12	Paket	11	Paket	**92**	%	12	Paket	12	Paket	100
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang di sediakan	12 Paket		12	Paket	12	Paket	**100**	%	12	Paket	12	Paket	100
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan	4 Laporan	4	Laporan	4	Laporan	**100**	%	12	Laporan	12	Laporan	100
	Peyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan		12	Laporan	12	Laporan	**100**	%	12	Laporan	12	Laporan	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Paket	14 Unit	12	paket	14	Paket	**117**	%	2	Paket	2	Paket	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Dokumen	6 Dokumen	12	Dokumen	8	Dokumen	**67**	%	2	Dokumen	2	Dokumen	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	7 Unit	23 Unit	4	Unit	23	Unit	**575**	%	7	Unit	7	Unit	100
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	4 unit kendaraan roda2, 2 unit kendaraan roda 3 dan 2 unit kendaraan roda 4 (fasilitasi mobil layanan keliling dan kendaraan operasional	9 Unit	23	Unit	9	Unit	**39**	%	5	Unit	5	Unit	100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 Unit AC, 1 set CCTV, 1 TV, 3 Laptop, 5 Komputer, 5 Pinter, 2 LCD proyektor, 1 Penghancur kertas, 10 finger print, 2 Ipad	14 Unit	4	Unit	14	unit	**350**	%	11	Unit	11	Unit	100

KODE REKENING	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2025	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN DANKKEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DANKEGIATAN TAHUN LALU (2023)						TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2024		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN		
					TARGET RENJA PD TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2023)		TINGKAT REALISASI TAHUN2023				REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
3.31.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang	4 Laporan	4 Laporan	4	Laporan	4	laporan	**100**	**%**	4	Laporan	4	Laporan	100
3.31.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat - menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	2 Laporan	12	Laporan	2	Laporan	**17**	**%**	1	Laporan	1	Laporan	100
	Peyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Laporan	12 Laporan	12	Laporan	12	Laporan	**100**	**%**	1	Laporan	1	Laporan	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang di sediakan	1 Laporan	2	12	Laporan	12	Laporan	**100**	**%**	1	Laporan	1	Laporan	100
3.31.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Hasil survey kepuasan masyarakat	7 Unit	2 Unit	2	Unit	33	unit	**1,650**	**%**	7	Unit	7	Unit	100
3.31.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan di bayarkan pajaknya	1Unit roda empat	1 Unit	1	Unit	1	Unit	**100**	**%**	1	Unit	1	Unit	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraa Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan di bayarkan pajak dan perizinannya	3 unit roda tiga, 5 unit roda empat; 8 unit roda dua	12 Unit	18	Unit	16	Unit	**89**	**%**	13	Unit	13	Unit	100
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara	20 Unit	14 Unit	4	Unit	16	Unit	**400**	**%**	41	Unit	41	Unit	100
	Urusan Bidang Industri									%					
3.31.02	**Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**	Persentase pertambahan jumlah industry kecil dan menengah	57.00%	2	**2.01**	%	**2.05**	%	**102**	**%**	**50.00**	%	**50.00**	%	**100**
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen rencana pembangunan industri	7 Dokumen	**6 Dokumen**	**2**	**Dokumen**	6	dokumen	**300**	**%**	**5**	**Dokumen**	**5**	**Dokumen**	**100**
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	2 Dokumen		**2**	**Dokumen**	2	Dokumen	**100**	**%**	**1**	**Dokumen**	**1**	**Dokumen**	**100**
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2 Dokumen	4 Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	**100**	**%**	1	Dokumen	1	Dokumen	**100**
3.31.03	**Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten / Kota**	**Persentase pemantauan dan pengawasan izin usaha industry di SIINas**	**79.00%**	76	75	%	76.43	%	**102**	**%**	77	%	77	%	**100**
3.31.03.2.01	**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten / Kota**	Jumlah dokumen Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten / Kota	**33 Dokumen**	**28 Dokumen**	28	Dokumen	28	Dokumen	**100**	**%**	6	Dokumen	6	Dokumen	**100**

KODE REKENING	URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA PERANGKAT DAERAH PADA TAHUN 2025	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN DANKKEGIATAN SAMPAI DENGAN TAHUN2022	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DANKEGIATAN TAHUN LALU (2023)						TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2024		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN		
					TARGET RENJA PD TAHUN 2023		REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI (2023)		TINGKAT REALISASI TAHUN2023				REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
3.31.03.2.01.02	Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPUI,IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/kota dalam sistem informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara Elektronik	Jumlah dokumen hasil fasilitas verifikasi teknis pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis perizinan berusaha sektor industri dan atau dalam rangka perluasan usaha untuk bidang usaha dengan resiko usaha menengsh tinggi dsn tinggi melalui SIINas yang terintegrasi dengan sistem OSS	32 Dokumen	1	28	Dokumen	21	Dokumen	**75**	**%**	6	Dokumen	6	Dokumen	**100**
3.31.04	**Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**	**Persentase pengelolaan data yang di gunakan untuk pengawasan**	**25%**	**21**	20	%	20.36	%	**102**	**%**	25	%	25	%	**100**
3.31.04.2.01	**Penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten / Kota**	**Jumlah dokumen Penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI**	**4 Dokumen**	**1 Dokumen**	1	Dokumen	1	dokumen	**100**	**%**	5	Dokumen	5	Dokumen	**100**
3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengelolaan dan Analisis Data Kawasan Industri Serta Datalain lingkup Kbupaten/kota melalui sistem informasi industri Nasional (SIINas)	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengelolaan dan Analisis Data Kawasan Industri Serta Data lain lingkup Kbupaten/kota melalui sistem informasi Industri Nasional (SIINas)	2 Dokumen	1	2	Dokumen	1	Dokumen	**50**	**%**	1	Dokumen	1	Dokumen	**100**

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.3 Kategorisasi Capaian Kinerja

Nilai	Kategori	Warna	Notifikasi
≥ 80%	Tercapai	Hijau	
60% - 79%	Kurang Tercapai	Kuning	
≤ 59%	Tidak Tercapai	Merah	

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 dapat dianalisis faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebih target kinerja, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, sebagaimana tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2

Analisis Faktor Penyebab, Implikasi serta

Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran

Program (Renstra Perangkat Daerah)	Capaian Kinerja	Notifikasi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100.16%	
Faktor Penyebab	Implikasi terhadap Target Renstra PD	Kebijakan yang diambil
Target Telah Tercapai	Telah Tercapai	
Program Perencanaan dan pembangunan industri	101.99%	

Program (Renstra Perangkat Daerah)	Capaian Kinerja	Notifikasi
Faktor Penyebab	Implikasi terhadap Target Renstra PD	Kebijakan yang diambil
Target Telah Tercapai	Telah Tercapai	
Program Pengendalian Ijin Usaha Industri Kabupaten/Kota	101.97%	
Faktor Penyebab	Implikasi terhadap Target Renstra PD	Kebijakan yang diambil
Target Telah Tercapai	Telah Tercapai	
ProgramPengelolaan Sistem Industri Nasional	103.35%	
Faktor Penyebab	Implikasi terhadap Target Renstra PD	Kebijakan yang diambil
Target Telah Tercapai	Telah Tercapai	
Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	64.20%	
Faktor Penyebab	Implikasi terhadap Target Renstra PD	Kebijakan yang diambil
Menurunnya Jumlah UTTP karena Pedagang Beralih menggunakan timbangan konvesional ke timbangan Digital dari 6 alat UUTP menjadi 1 alat UTTP	Tidak tercapainya target renstra	Updating data jumlah UTTP
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagagan	190.48%	
Faktor Penyebab	Implikasi terhadap Target Renstra PD	Kebijakan yang diambil
Target Telah Tercapai	Telah Tercapai	
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	317.20%	
Faktor Penyebab	Implikasi terhadap Target Renstra PD	Kebijakan yang diambil

Program (Renstra Perangkat Daerah)	Capaian Kinerja	Notifikasi
Target Telah Tercapai	Telah Tercapai	
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	104.38%	
Faktor Penyebab	Implikasi terhadap Target Renstra PD	Kebijakan yang diambil
Target Telah Tercapai	Telah Tercapai	

Sumber : Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten Nganjuk berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta target kinerja pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan bisnis utama *(core bussiness)* dan indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk

No.	Indikator IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Proyeksi				Catatan Analisis
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	Urusan Dinas Perindustrian dan Perdagangan													
1	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah Di Kabupaten	0,49%	1,87%	1,97%	2,01%	0,49%	1,97%	0,95%	0.6162%	2,01%	1,15	1,35	1,55	
2	Persentase Terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	82,0%	90%	90%	90%	82,01%	95,83%	96.35%	96.4400%	90%	93,97	93,97	93,97	

5.	Persentase alat-alat ukur, takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang berlaku	88,30%	85,00	85,55	86,11	63,52%	47,39%	53,31%	99.5000%	86,11	85,00	85,55	86,11	
6.	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan diwilayah Kerjanya	100%	100%	100%	10%	100%	100%	97%	100%	100%	100%	100%	100%	

TABEL 2.4

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAHUN 2022-2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2022	Realisasi tahun 2022	Capaian	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten	1,97%	2,00	101,52	2.01	2,05	101,99
		Persentase Hasil Pemantauan dan pengawasan jumlah izin usaha industri (IUI) Industri Kecil Menengah	73,68%	75,00	101,79	75,00	76,47	101,96
2.	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Persentase Fasilitasi izin usaha perdagangan	90,00%	91,30	101,44	90,00	100	111,11
		Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	90,00%	98,38	109,31	90,00	96,44	107,16
		Presentase Peningkatan Volume Usaha Perdagangan	5,98%	6,57	109,87	6,00	6,03	100,5
		Presentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlemhkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku	85,55%	53,32	62,33	86,11	55,28	64,20

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan

a. Rendahnya daya saing industri dikarenakan keterbatasan kemampuan SDM, penguasaan teknologi dan standarisasi produk
b. Belum optimalnya pemanfaatan bahan baku potensial unggulan daerah menuju terbentuknya sumber daya industri daerah
c. Belum terbentunya sentra industri
d. Terbatasnya jaringan informasi perdagangan baik dalam negeri maupun luar negeri
e. Belum tertibnya izin usaha industri yang dimiliki oleh pelaku usaha Industri
f. Belum optimalnya Pemberdayaan eksportir, importer dan perizinan terhadap perdagangan dan peningkatan produk
g. Belum tertibnya Penataan toko modern
h. Rendahnya Kepatuhan Pemilik ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) untuk melakukan tera/tera ulang
i. Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana Pasar rakyat
j. Belum Optimalnya Pemberdayaan Pengelola dan Pedagang .

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Hal Kritis Yang Terkait Dengan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

1. Bidang Perindustrian

Perkembangan di bidang industri terus mengalami pertumbuhan, dimana setiap tahunnya bermunculan banyak industri non formal (rumahtangga) di berbagai wilayah Kabupaten Nganjuk, baik berupa kelompok usaha industri maupun industri perorangan. Selain itu, perkembangan industri formal juga mengalami tren yang terus naik. Dengan adanya berbagai pembinaan dari Dinas perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk. industri rumah tangga yang ada dapat meningkat menjadi industri kecil yang memiliki legalitas usaha. Demikian pula dengan industri kecil semakin

berkembang menjadi industri menengah dan besar dengan dimilikinya legalitas usaha berupa Ijin Usaha Industri (IUI). Akan tetapi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian NOMOR 41/MIND/PER/6/2008. Melalui beberapa program dan kegiatan yang selaras dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih.Perkembangan usaha di sektor industri seperti tercantum dalam tabel. 2.5

Tabel 2.5
Perkembangan Usaha Industri Pada tahun 2019-2023

JENIS DATA							
a. Industri Non Formal							
No	**Uraian**	**Tahun 2019**	**Tahun 2020**	**Tahun 2021**	**Tahun 2022**	**Tahun 2023**	**Satuan**
1.	Unit Usaha	15 406	15 428	15 451	15 493	16 268	Unit
2.	Tenaga Kerja	44.192	44 236	44 280	44 374	44 424	Orang
3.	Nilai Produksi	1 887 593 501	1 887 993 501	1 888 393 501	1 889 343 501	1 889 893 501	Rp
4	Nilai Investasi	20 880 279	21 480 279	22 280 279	24 080 279	25 080 279	Rp
b. Industri Formal							
1	Unit Usaha	1.294	1331	1327	1369	1530	Unit
2	Tenaga Kerja	17.658	17 702	17 724	17 812	18 520	Orang
3	Nilai Produksi	3 799 539	3 799 539	3 974 539	4 324 539	52 474 539	Rp
4	Nilai Investasi	73 657 966	73 657 966	74 357 966	75 757 966	401 157 966	Rp

2. Bidang Perdagangan

Bidang perdagangan menjadi salah satu sektor yang menjadi tupoksi dari Dinas perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk. Dalam bidang perdagangan, pembinaan yang dilakukan adalah melalui peningkatan perdagangan dalam negeri (domestik) dan juga perdagangan luar negeri (ekspor) dimana keduanya didukung juga melalui kegiatan pameran sebagai bentuk promosi perdagangan. Berikut rekapitulasi data di bidang perdagangan tahun 2021-2023 seperti pada table 2.6 berikut

Tabel 2.6
Nilai Ekspor

No	**Uraian**	**Tahun 2021**	**Tahun 2022**	**Tahun 2023**	**Satuan**
1	Nilai Ekspor	13 515,41	13 921,63	12 983,81	(miliar Rp)

Sumber Data BPS Kabupaten Nganjuk.

1. Bidang Metrologi

Dengan terbitnya Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dari Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementrian Perdagangan Nomor : 56/PKTN/KKPTTU/08/2018 dan berdasarkan Hasil Penilaian dan Evaluasi Kemampuan Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP Unit Metrologi Legal (UML) oleh Tim Penilai, maka Bidang Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk mampu melaksanakan Pelayanan Tera dan Tera Ulang sesuai lingkup :

1) Meter Kayu, Timbangan Otomatis, Timbangan Bukan Otomatis, Anak Timbangan dan Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak ;
2) Ruang lingkup pelayanan tera dan tera ulang UTTP meliputi :

Tabel 2.7
RUANG LINGKUP DAN DAFTAR STANDRAT YANG DIMILIKI

NO	RINCIAN UTTP	RALATAN DAN STANDART UKURAN YANG DIMILIKI /DIGUNAKAN
1	Meter Kayu	parator sidang 1m / 1m
2	Timbangan Elektronik Kelas III dan IIII (Termasuk Timbangan Jembatan Maksimum Kapasitas 5 Ton)	- Anak Timbangan Kelas F2 (1 mg – 1000 g) - Anak Timbangan Kelas M1 (1 mg – 500 g) - Anak Timbangan Kelas M1 (1 g – 1000 g) - Anak Timbangan Kelas M1 (1 Kg – 20 Kg) - Anak Timbangan Kelas M2 (100mg –1000 g) - Anak Timbangan Kelas M2 (2 Kg) - Anak Timbangan Kelas M2 (5 Kg) - Anak Timbangan Kelas M2 (10 Kg) - Anak Timbangan Kelas M2 (20 Kg) - Anak Timbangan Lemping sampai dengan 110 kg - Anak Timbangan Bidur M2 20kg (25 buah)
3	Timbangan Pegas	
4	Timbangan Cepat	
5	Timbangan Cepat Meja	
6	Neraca	
7	Dacin	
8	Timbangan Milisimal	
9	Timbangan Sentisimal	
10	Timbangan Desimal	
11	Timbangan Bobot Ingsut	
12	Timbangan Meja Beranger	
13	Anak Timbangan sebagai Perlengkapan Timbangan Neraca, dan Meja	- Anak Timbangan Kelas M1 (1 mg – 500 g) - Anak Timbangan Kelas M1 (1 g – 1000 g) - Anak Timbangan Kelas M1 (1 Kg – 20 Kg) - Anak Timbangan Kelas M2 (100mg –1000 g) - Timbangan Elektronika 2000 g/0.01 g - Anak Timbangan Kelas F2 (1 mg – 1000 g) - Timbangan Elektronika 2000 g/0.001g
14	Pompa Ukur BBM	- Bejana ukur 5L, 10L, 20L - Gelas ukur 1000ml/10ml - penyipat datar - Landasan bejana ukur - Stopwatch - thermometer

Adapun Jumlah Ukur Takar Timbang dan Perlengkapan tahun 2019-2023

adalah seperti pada tabel 2.8 berikut :

Tabel 2.8
Jumlah UTTP

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Satuan
1	Jumlah UTTP	21.191	15.245	11.373	9.597	9.854	Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)

2. Bidang Pasar

Melalui pembinaan yang dilakukan oleh Bidang Pengelolaan Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk, peningkatan manajemen pengolahan pasar dan disiplin pedagang di dalam lingkungan pasar sebagai upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah terus dilakukan secara berkesinambungan. Retribusi pelayanan pasar terdiri dari Biaya balik nama dan perpanjangan SK Hak ijin Pakai atas Toko, Bedag tepi/luar,bedag dalam Los, dibawah los, pelataran, Penitipan Kendaraan serta Ternak dalam Pasar. Adapun data tentang Retribusi Pelayanan

Pasar tahun 2019-2023 adalah seperti pada tabel 2.9 berikut terlampir

Tabel 2.9
Retribusi Pelayanan Pasar

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	SATUAN
1	Bedag tepi /luar	1.473.576.036,82	1.165.231.475,67	1.598.342.153,80	1.583.084.763,46	1.670.786.062,65	Rp
2	Bedag dalam	757.905.200,00	538.914.661,00	736.691.800,00	1.094.309.400,00	1.235.094.000,00	Rp
3	Bedag dalam los	678.263.200,00	491.850.900,00	615.613.400,00	726.525.000,00	817.149.500,00	Rp
4	Di bawah Los	663.931.800,00	495.770.220,00	689.486.000,00	971.666.900,00	1.118.463.400,00	Rp
5	Pelataran	162.293.500,00	127.723.150,00	178.237.200,00	191.854.100,00	201.250.400,00	Rp
6	Ijin tempat	239.424.496,16	245.169.334,48	256.731.475,76	250.701.439,33	248.750.166,18	Rp
7	Penitipan kendaraan	152.944.500,00	116.375.000,00	172.444.000,00	164.032.500,00	199.653.000,00	Rp
8	Ternak	60.811.000,00	47.832.500,00	64.899.000,00	151.842.500,00	199.479.000,00	Rp
9	BBN (Bea Balik Nama)	43.770.692,50	16.739.306,00	46.376.060,00	27.773.421,00	34.611.237,00	Rp
10	Kebersihan	245.401.200,00	185.508.000,00	252.608.000,00	258.528.600,00	291.490.100,00	Rp
JUMLAH		**4.478.321.625,48**	**3.431.114.547,15**	**4.611.429.089,56**	**5.420.318.623,79**	**6.016.726.865,83**	Rp

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan Yang dihadapi Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1.	Rendahnya jumlah pelaku usaha industri yang berdaya saing	Pelaku usaha industri masih bersifat konvensional	Manajemen usaha dan peralatan yang digunakan bersifat tradisional
		Standarisasi produk yang belum sesuai dengan SNI	Rendahnya kesadaran pelaku usaha industri terhadap legalitas produk
		Kurang optimalnya informasi produk unggulan potensi daerah	Kurangnya/rendahnya pengetahuan pelaku usaha industri tentang pemasaran
		Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran antar daerah	Rendahnya pengetahuan dan sarana prasarana pelaku usaha industri terhadap teknologi
2	Belum tertibnya pelaku usaha industri dalam melakukan usahanya	Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian (Monev) yang dilakukan	Minimnya kompetensi SDM pelaksana sektpr industri
			Terbatasnya jumlah personil pelaksana sektor industri
		Rendahnya ketaatan pelaku usaha industri sesuai dengan perundangan	Belum optimalnya pengetahuan tentang ketaatan dan kewajiban

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		yang berlaku	pelaku usaha industri
3	Jumlah Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang dilayani belum maksimal	Masih rendahnya kepatuhan pemilik UTTP dalam melakukan tera/tera ulang sebagai wujud dari perlindungan konsumen . Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanan tera /tera belum memadai.	Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai tera/tera ulang. Tidak memadainya sarana berupa mobil layanan tera/tera ulang.
		3. Pengawasan pada UTTP yang sudah di tera/tera ulang dan BDKT yang sesuai dengan aturan masih belum optimal	3. Tidak adanya tenaga pengawas yang sudah bersertifikat
4	Penataan Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan	Sarana dan Prasarana distribusi Perdagangan belum memadai Belum optimalnya Pengelolaan Pembayaran Retribusi Belum Optimalnya Pemberdayaan Pengelola dan Pedagang	Tidak memadainya Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan Pengelolaan Pembayaran Retribusi Belum dilaksanakan Secara Elektronik Pengelolaan masih dilaksanakan secara tradisional

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
5	Harga ditentukan Pedagang/pasar	Belum dapat menstabilisasi harga barang pokok dan barang Penting	Belum Optimalnya Pelaksanaan Operasi Pasar
7	Belum siapnya Produk yang siap diekspor	Kreteria Produk belum memenuhi syarat	Belum Profesionalnya Pelaku Usaha
8	Belum Optimalnya Penataan toko modern	Sudah adanya Pelaku Usaha yang sudah beroperasional sesuai dengan peraturan	Tidak berkembangnya pasar rakyat karena Belum Optimalnya Penertiban berdirinya toko modern

2.3.3 Dampak Terhadap Pencapaian Program Prioritas Daerah serta Program Nasional/Internasional Yang Mencakup Standar Pelayanan Minimal dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)

Visi pembangunan jangka panjang Kabupatan Nganjuk yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 adalah **"NGANJUK YANG MAJU, ADIL DAN SEJAHTERA"**, pelaksanaan jangka menengah Daerah dijabarkan lebih lanjut dalam RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 dengan tujuan pembangunan Daerah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan penanggulangan kemiskinan melalui pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.
2. Meningkatnya kualitas pembangunan manusia yang unggul dan berdaya saing.
3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik.
4. Meningkatnya kondisi sosial masyarakat yang harmonis dan berbudaya.

Dalam pencapaian tujuan pembangunan Daerah dimaksud,Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan ke-.1

Dengan dicanangkannya program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

di Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan program pencapaian 17 Tujuan TPB dan mengintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Secara keseluruhan 17 Tujuan TPB tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun.
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian yangberkelanjutan.
3. Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan bagi seluruh orang di segala usia.
4. Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi setiap orang.
5. Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh perempuan.
6. Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi seluruh orang.
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan serta modern bagi semua orang.
8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh, produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang.
9. Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi.
10. Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antaranegara.
11. Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, berketahanan, aman dan berkelanjutan.
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim serta dampaknya.
14. Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan dan sumber daya lautsecara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.
15. Melindungi, memperbarui, dan mendorong pemakaian ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.
16. Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta

membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.

17. Memperkuat perangkat-perangkat implementasi (means of implementation) dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan

2.3.4 Tantangan dan Peluang Dalam Peningkatan Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tantangan

1. Terkait dengan Lingkungan

Perkembangan teknologi akibat revolusi industri 4.0, perubahan regulasi dan kebijakan akibat perang dagang serta meningkatnya globalisasi, Diharapakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan mampu mempelajari fenomena perubahan lingkungan dan menyerap informasi yang berkembang dan mampu memprediksi outcome/impact dari suatu kebijakan

2. Terkait Data Dan Informasi

Data dan informasi sangat penting dalam pengambilan kebijakan dalam penyusunan rencana kerja dan pengambilan keputusan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan diharapkan memiliki data dan informasi yang akurat, lengkap dan mutakhir

3. Terkait Kapasitas Kebijakan

Dalam pengelolaan kebijakan dan program, monitoring dan evaluasi harus dilakukan menyeluruh terhadap outcome/impact dan melibatkan analisis mendalam terhadap data dan kualitas dan capaian kinerja. Sehingga kebijakan dan program mendasarkan pencapaian outcome/impact.

b. Peluang

1. Adanya kebijakan otonomi daerah (desentralisasi) yang memberikan keleluasaan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai wujud dari partisipasi
2. Adanya keterbukaan kerjasama dengan pihak lain baik Pemerintah Pusat, Propinsi, Kota/ Kabupaten lain, swasta, lembaga donor, LSM dan lembaga- lembaga lain untuk

memberikan dukungan peningkatan kapasitas kelembagaan, manajemen maupun program

3. Adanya kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten yang mendukung pengembangan Industri, Perdagangan dan Pasar
4. Jumlah penduduk, pelaku usaha, sumber daya alam untuk dikembangkan,
5. Ketahanan Pelaku Usaha Kecil dan menengah terhadap krisis ekonomi relative cukup kuat karena kemandirian pelaku usaha
6. Kemudahan dalam menyampaikan informasi melalui berbagai media

2.3.5 Isu-isu Penting dan Strategis Untuk Ditindaklanjuti Dalam Perumusan Program dan Kegiatan

No	Isu- isu strategis	Tindak lanjut program	Ket
1.	Rendahnya daya saing industri dikarenakan keterbatasan kemampuan SDM, penguasaan teknologi dan standarisasi produk	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 1. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber daya Industri 2. Sub Kegiatan Koordinasi,sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta masyarakat	
2	Belum terbentunya sentra industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Kegiatan Penyusunan, Penerapan dan	
		Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana industri	
3	Belum tertibnya izin usaha industri yang dimiliki oleh pelaku usaha Industri	Program Pengendalian izin usaha industry Kegiatan Penerbitan izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan	

No	Isu- isu strategis	Tindak lanjut program	Ket
		Usaha Industri (IPUI), izin usaha Kawasan Industri ((IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI< IPUI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten /Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan BerusahaTerintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Perizinan di bidang Industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	
4.	Terbatasnya jaringan informasi perdagangan baik dalam negeri maupun luar negeri	Program Pengembangan Ekspor Kegiatan Penyelenggaran Promosi dagang melalui Pameran Dagang dan misi dagang bagi produk ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 Daerah Kabupaten/Kota Sub	

No	Isu- isu strategis	Tindak lanjut program	Ket
		Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	
5.	Rendahnya Kepatuhan Pemilik ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) untuk melakukan tera/tera ulang	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera ulang dan Pengawasan Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	
6.	Belum OptimalnyaSarana dan Prasarana Pasar rakyat	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
		Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	

No	Isu- isu strategis	Tindak lanjut program	Ket
7.	Belum Optimalnya Pemberdayaan Pengelola dan Pedagang .	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah **"Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis yang Didukung SDM Berkualitas".**

Proses review rancangan awal RKPD Tahun 2025 adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD Tahun 2025 dengan analisis kebutuhan. Temuan proses reviu tersebut berupa identifikasi rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan yang sesuai namun besarannya berbeda, sebagaimana disajikan tabel berikut:

Tabel 2.10

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						**24.150.439.760,00**							**23.052.595.606,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**24.150.439.760,00**							**23.052.595.606,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**10.221.370.391,00**							**8.518.779.000,00**	
1.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	***Prosentase pelaku usaha yang memeperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan***	**90 %**			**90 %**	**179.380.000,00**						**90 %**	**243.779.000,00**	
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	*jumlah rekomendasi teknis penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan yang diproses*	2 Dokumen			2 Dokumen	30.000.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P2 • Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	pelaku usaha	2 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 Dokumen			2 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	pelaku usaha	2 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	*Prosentase penerbitan TDG*	90 %			90 %	98.890.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	pelaku usaha	90 %	108.779.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	27 Dokumen			25 Dokumen	98.890.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	pelaku usaha	27 Dokumen	108.779.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	-	20 Dokumen			-	26.390.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	pelaku usaha	20 Dokumen	30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.03.0001	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	5 Dokumen			5 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	pelaku usaha	5 Dokumen	15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.03.0002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri														
			Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	5 Dokumen			2 Dokumen	16.390.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	pelaku usaha	5 Dokumen	15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.02.2.04	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	*Jumlah rekomendasi teknis Surat Tanda Pendaftaran dan/atau lanjutan Waralaba (STPW) dalam negeri terintegrasi secara elektronik luar negeri*	2 Dokumen			2 Dokumen	13.750.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	pelaku usaha	2 Dokumen	30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.04.0001	Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri														
			Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	1 Dokumen			2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	pelaku usaha	1 Dokumen	15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.04.0002	Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	1 Dokumen			2 Dokumen	3.750.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	pelaku usaha	1 Dokumen	15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum diTempat	*Jumlah rekomendasi teknis izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat*	1 Dokumen			1 Dokumen	4.950.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	pelaku usaha	1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.05.0002	Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) Golongan B dan C														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 dokumen			1 dokumen	4.950.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	pelaku usaha	1 dokumen	10.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahayadi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah rekomendasi Teknis izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di tempat*	4 Laporan			1 Dokumen	5.400.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	pelaku usaha	4 Laporan	15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.06.0002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	2 Dokumen			2 Dokumen	5.400.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	pelaku usaha	2 Dokumen	15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	***Omzet perdagangan***	**1089 milyar**			**1089 milyar**	**9.078.934.041,00**						**1089 milyar**	**7.150.000.000,00**	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan*	24 Unit			8 unit	8.478.996.841,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	pedagang pasar rakyat	9 Unit	6.500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	6 Unit			6 Unit	8.478.996.841,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	pedagang pasar rakyat	6 Unit	6.500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan disusun berdasarkan analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan anggaran yang tersedia. Selain itu, program kegiatan juga disusun dengan memperhatikan usulan dari masyarakat melalui Musrenbang Kecamatan dan Forum Gabungan Perangkat Daerah usulan dari masyarakat ditelaah dengan mempertimbangkan berbagai faktor,antara lain urgen tidaknya, dana yang tersedia dan kemanfaatannya, maka berbagai aspirasi yang ada dapat terserap demi penyempurnaan Renja yang diharapkan akan memberikan output seperti yang diharapkan semua pihak.

Tabel 2.11

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Nihil				

Sumber: Hasil Kajian Perangkat Daerah Tahun 2023

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2025 mengangkat tema **" Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan,"** dengan 8 (Delapan) prioritas pembangunan nasional tahun 2025 sebagai berikut :

1. Memperkokoh ideologi pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)
2. Memantapkan system pertahanan keamanan Negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energy, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
3. Melanjutkan Pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalu peran aktif koperasi
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Sains, Teknologi,Pendidikan, Kesehatan Prestasi olah raga, kesetaraan Gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan penyandang disabilitas
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Pengembangan Industri berbasis Sumber Daya alam untuk meningkatkan Nilai tambah didalam Negeri
6. Membangun dari desa dandari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi,dan Pemberantasan Kemiskinan
7. Memperkuat Reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan Pemberantasan korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan
8. Memperkuat Penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta Peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 adalah " **Meningkatnya Produktifitas sektor Industri dan perdagangan"**

adapun sasaran yang akan dicapai adalah "Meningkatkan pertumbuhan sektor industri dan Perdagangan", dengan target kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR		SATUAN	Target 2025
1	2	3		4	5	6
1	Meningkatnya produktivitas sektor industri dan perdagangan			Pertumbuhan PDRB(ADHB) sektor industri	%	11.90
				Pertumbuhan PDRB(ADHB) sektor Perdagangan	%	5,50
		Meningkatkan pertumbuhan sektor industri	1	Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah	%	2,2
		Meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan	2	Persentase peningkatkan omzet sektor perdagangan	%	6,2

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 terdiri dari program-program yang menunjang visi misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk. Program ini mencakup urusan Perindustrian dan Perdagangan serta program-program penunjang

6.1 BIDANG PERINDUSTRIAN

6.1.1 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Indikator kinerja yang ingin dicapai pada program ini adalah Persentase Peningkatan Jumlah Industri Kecil dan menengah Melalui Sosialisasi dan Penyusunan Kebijakan Pembangunan Industri, fasilitasi sarana dan Prasarana bagi Industri dan Pemberdayaan Industri dan Peran serta masyarakat

6.1.2 Program Pengendalian Izin usaha Industri

Indikator yang ingin dicapai pada Program ini adalah Persentase jumlah pemantauan dan pengawasan IUI,IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota berbasis SIINAS

6.1.3 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Indikator yang ingin dicapai pada program ini adalah Persentase Pengelolaan sistem informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI melalui Pengumpulan, Pengolahan, analisis Data Industri, Diseminasi dan Publikasi data informasi serta Pemantaun dan Evaluasi kepatuhan Industri

6.2 BIDANG PERDAGANGAN

6.2.1 Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Indikator yang ingin dicapai pada Program ini adalah Persentase Pengajuan Rekomendasi teknis izin Penerbitan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan, Penerbitan Tanda Daftar Gudang, Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri, Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba lanjutan dari Waralaba Luar Negeri, Penerbitan Surat izin usaha Perdagangan Minuman beralkohol Golongan B dan C serta Pengendalian fasilitas Penyimpanan bahan berbahaya dan Pengawasan

6.2.2 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Indikator yang ingin dicapai pada program ini adalah Jumlah Sarana dan prasarana Pasar yang difasilitasi serta Pembinaan terhadap Pengelola Pasar.

6.2.3 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Indikator yang ingin dicapai pada program ini adalahPersentase Pengawasan

harga bahan pokok serta menjamin ketersediaa, PengendalianHarga dan Stok barang kebutuhan Pokok dan barang Penting lainnya serta Pengawasan Pupuk dan Pestisida bersubsidi.

6.2.4 Program Pengembangan Ekspor

Indikator yang ingin dicapai pada Program ini adalah Persentase Peningkatan fasilitasi Pelaku Usaha Ekspor melalui Penyelenggaraan promosi dagang, pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor.

6.2.5 Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Indikator yang ingin dicapai pada program ini adalah Persentase Alat -alat ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku serta Pengawasan.

6.2.6 Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri

Indikator yang ingin dicapai pada program ini adalah Persentase Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam negeri. Melalui Pelaksanaan Promosi,Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri

TABEL 3.2

RIVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. NGANJUK TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						**24.150.439.760,00**							**23.052.595.606,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**24.150.439.760,00**							**23.052.595.606,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**10.221.370.391,00**							**8.518.779.000,00**	
1.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	***Prosentase pelaku usaha yang memeperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan***	**90 %**			**90 %**	**179.380.000,00**						**90 %**	**243.779.000,00**	
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	*jumlah rekomendasi teknis penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan yang diproses*	2 Dokumen			2 Dokumen	30.000.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	pelaku usaha	2 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 Dokumen			2 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	pelaku usaha	2 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	*Prosentase penerbitan TDG*	90 %			90 %	98.890.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	pelaku usaha	90 %	108.779.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 dokumen			1 dokumen	4.950.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	pelaku usaha
	3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah rekomendasi Teknis Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di tempat*	4 Laporan			1 Dokumen	5.400.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	pelaku usaha
	3.30.02.2.06.0002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	2 Dokumen			2 Dokumen	5.400.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	pelaku usaha
2.	3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	***Omzet perdagangan***	**1089 milyar**			**1089 milyar**	**9.078.934.041,00**					
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan*	24 Unit			8 unit	8.478.996.841,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	pedagang pasar rakyat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan											
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	6 Unit			6 Unit	8.478.996.841,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	pedagang pasar rakyat
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	*Jumlah pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan*	35 pasar			35 pasar	599.937.200,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	pedagang pasar rakyat
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen			1 Dokumen	599.937.200,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	pedagang pasar rakyat
3.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	***Prosentase Kinerja Realisasi Pupuk***	**96 %**			**96 %**	**180.000.000,00**					
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan informasi harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota*	4 Laporan			4 laporan	110.000.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	pelaku usaha

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota											
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan			4 Laporan	50.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	pelaku usaha
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota											
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan			2 Laporan	60.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	pelaku usaha

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah laporan pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	4 Laporan			4 Laporan	70.000.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	pelaku usaha
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi											
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	4 Laporan			4 Laporan	70.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	pelaku usaha

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.	3.30.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	***Presentase fasilitasi pelaku usaha ekspor***	**60 %**			**60 %**	**94.352.000,00**					
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang di fasilitasi*	12 Pelaku Usaha			12 Pelaku Usaha	94.352.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	pelaku usaha
	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	4 Pelaku Usaha			10 Pelaku Usaha	72.850.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	pelaku usaha
	3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor											
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	3 Produk			5 Produk	21.502.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	pelaku usaha

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.	3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	***Persentase Alat Ukur takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda Tera sah yang berlaku***	**85,55 %**			**85,55 %**	**258.280.800,00**					
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	*jumlah pelaksanaan metrologi legal berupa tera/tera ulang dan pengawasan*	8611 UTTP			8555 UTTP	258.280.800,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Pemilik UTTP
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	9800 Unit			8555 Unit	214.450.800,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Pemilik UTTP
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal											
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	750 Orang			750 Orang	43.830.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Pemilik UTTP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	***Persentase Fasilitasi Promosi Dagang dan Pemasaran Produk***	**58,44 %**			**58,44 %**	**430.423.550,00**					
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	*jumlah UMKM Pelaksanaan Promosi pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri*	47 UMKM			45 UMKM	430.423.550,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	UMKM
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	47 UMKM			100 UMKM	430.423.550,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P7 - Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	UMKM
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**13.929.069.369,00**					
1.	**3.31.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan***	**85,30 Nilai**			**85,30 Nilai**	**12.954.069.369,00**					
	3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	18 Dokumen			17 Dokumen	179.172.718,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	aparatur sipil negara
	3.31.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen			20 Dokumen	109.556.388,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	aparatur sipil negara
	3.31.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan			4 Laporan	37.643.780,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	aparatur sipil negara
	3.31.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	31.972.540,00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	aparatur sipil negara
	3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	104 Dokumen			104 Dokumen	8.839.925.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	aparatur sipil negara
	3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/bulan			70 Orang/bulan	8.723.925.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	aparatur sipil negara
	3.31.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen			60 Dokumen	51.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	aparatur sipil negara
	3.31.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	aparatur sipil negara
	3.31.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	25 Laporan			25 Laporan	55.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	aparatur sipil negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3.31.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi barang milik Daerah pada Perangkat Daerah*	1 Dokumen			1 Dokumen	17.652.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	aparatur sipil negara
	3.31.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD											
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan			18 Laporan	17.652.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	aparatur sipil negara

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	1 Dokumen			1 Dokumen	289.310.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	aparatur sipil negara
	3.31.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	85 Paket			254 Paket	139.310.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	aparatur sipil negara
	3.31.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	85 Orang			65 Orang	150.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	aparatur sipil negara
	3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi umum Perangkat Daerah*	4 Dokumen			4 Dokumen	1.162.513.716,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	aparatur sipil negara
	3.31.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket			10 Paket	9.998.400,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	aparatur sipil negara
	3.31.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket			5 Paket	154.162.518,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	aparatur sipil negara
	3.31.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	108.004.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	aparatur sipil negara
	3.31.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	534.231.300,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	aparatur sipil negara
	3.31.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			12 Dokumen	9.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	aparatur sipil negara
	3.31.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu											
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			4 Laporan	43.892.500,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	aparatur sipil negara
	3.31.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			4 Laporan	303.225.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	aparatur sipil negara
	3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Pengadaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	7 Unit			12 unit	1.298.347.533,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.31.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	8 Unit			8 Unit	663.728.400,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.31.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel											
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	56 Unit			4 Unit	140.556.850,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.31.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	29 Unit			25 Unit	494.062.283,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	4 Laporan			4 Laporan	419.976.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	aparatur sipil negara
	3.31.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	aparatur sipil negara
	3.31.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			1 Laporan	306.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	aparatur sipil negara
	3.31.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			1 Laporan	108.976.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	aparatur sipil negara
	3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Unit Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*	7 Unit			7 unit	747.172.400,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	aparatur sipil negara
	3.31.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit			1 Unit	100.650.400,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	aparatur sipil negara
	3.31.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit			24 Unit	93.076.200,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	aparatur sipil negara
	3.31.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit			10 Unit	9.990.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	aparatur sipil negara
	3.31.01.2.09.0008	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit			20 Unit	27.550.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	aparatur sipil negara
	3.31.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			1 Unit	300.033.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	aparatur sipil negara
	3.31.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit			1 Unit	215.672.600,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	aparatur sipil negara
2,	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	***Persentase jumlah dokumen perencanaan dan pembangunan industri yang disusun***	**57 %**			**57 %**	**745.000.000,00**					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota*	8 Dokumen			7 Dokumen	745.000.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Industri Kecil dan Menengah
	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota											
			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen			1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Industri Kecil dan Menengah
	3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Pemerataan Industri											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen			1 Dokumen	85.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Industri Kecil dan Menengah
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri											
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	2 Dokumen			2 Dokumen	105.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Industri Kecil dan Menengah
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2 Dokumen			2 Dokumen	230.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Industri Kecil dan Menengah
	3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri											
			Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen			1 Dokumen	85.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Industri Kecil dan Menengah
	3.31.02.2.01.0008	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan				2 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Industri Kecil dan Menengah
	3.31.02.2.01.0009	Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri											
			Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyabaran dan perwilayahan industri				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Industri Kecil dan Menengah
3,	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	***Persentase pemantauan dan pengawasan Izin usaha Industri di SIINas***	**79 %**			**79 %**	**130.000.000,00**					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Penerbitanizin Usaha Industri (IUI) Izin Perluasan usaha Industri (IPUI) Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota*	36 Dokumen			33 Dokumen	130.000.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Industri Kecil dan Menengah
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota											
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadep Perizinan Berusaha Industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen			1 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investasi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Industri Kecil dan Menengah
	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)											

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		
											NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	8 Dokumen			7 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P2 - Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi P1 Kab : Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Investesi Berbasis Sektor Potensial Pertanian, serta Pengembangan Perdagangan dan Industri	Industri Kecil dan Menengah
4.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	***Persentase pengelolaan data dalam SIINas***	**25 %**			**25 %**	**100.000.000,00**					

Tabel 4.4
Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Khusus

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Belanja	Sasaran Penerima Manfaat			Sumber Pendanaan
			Nama Objek	Jumlah	Rincian	
	N I H I L					

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan, apabila terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan dimaksud dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai kedudukan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan rencana pembangunan tahunan daerah (RKPD), sebagai implementasi sasaran strategis rencana pembangunan daerah (RPD) dan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan jangka panjang Daerah Kabupaten Nganjuk.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. Melaksanakan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya.
   b. Melakukan pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja, serta kelompok sasaran sesuai dengan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan; dan

c. menjaga konsistensi antara RKPD, Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025; dan

3. Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nganjuk.

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001